

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan dan pembangunan memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam mewujudkan kota yang ideal. Pembangunan wilayah harus didasari dengan kebutuhan lahan dan kebutuhan perekonomian yang direncanakan. Globalisasi yang semakin berkembang menjadi salah satu penyebab yang cukup signifikan dalam mempengaruhi perkembangan di Indonesia baik pemerintah Kota maupun Kabupaten untuk melakukan pembangunan secara fisik. Kegiatan pembangunan yang sangat signifikan sehingga mengharuskan Pemerintah di Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang pembangunan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu UU no 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur agar setiap pembangunan yang dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah saling berkaitan dan terdapat konfigurasi didalamnya. Setiap pembangunan daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh negara-negara sedang berkembang pada umumnya berorientasi pada tahap maupun system untuk memperbaiki atau mengangkat tingkat hidup masyarakat pada wilayah tersebut. Dalam upaya pembangunan wilayah, masalah yang terpenting yang menjadi perhatian para ahli ekonomi dan perencanaan wilayah adalah menyangkut proses pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam proses pembangunan wilayah yang masih merupakan target utama dalam rencana pembangunan di samping pembangunan sosial. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output per kapita. Hal tersebut menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai gambaran dari kenaikan taraf hidup masyarakat didalamnya. Pertumbuhan ekonomi daerah pada dasarnya dipengaruhi oleh keunggulan komparatif suatu daerah, spesialisasi wilayah, serta potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Oleh karena itu pemanfaatan dan pengembangan seluruh potensi ekonomi menjadi prioritas utama yang harus digali dan dikembangkan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Menurut Arsyad (1999) menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan

permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah Tinggi rendahnya resiko suatu instrumen terutama yang ada di pasar modal Indonesia sangatlah dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik suatu negara serta kondisi perusahaan itu sendiri. Peran sektor unggulan dalam usaha pengembangan dan pembangunan ekonomi wilayah ditujukan guna mengatasi keterbatasan dana dan sumber daya serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk dapat melaksanakan pembangunan dan pengembangan kota yang optimal dan dalam rangka optimasi dan efisiensi pembangunan perekonomian daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan.

Dalam lingkup pengarahan pembangunan diperlukan adanya suatu prioritas. Penentuan prioritas pembangunan dapat didasarkan kepada suatu pendapat yang menyangkut bahwa pertumbuhan dari suatu wilayah akan dapat dioptimalkan apabila kegiatan pembangunan dapat dikonsentrasikan pada aktivitas-aktivitas sektor ekonomi yang dapat memanfaatkan kekuatan atau kelebihan yang secara alamiah dimiliki oleh wilayah yang bersangkutan, khususnya wilayah Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan merupakan bagian dari kawasan strategis yang memiliki sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulannya adalah pertanian, pariwisata, industri dan perikanan. Dalam Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029) Kabupaten Pekalongan memiliki fungsi sebagai salah satu wilayah pengembangan Pusat Pelayanan Lokal dan Provinsi.

Potensi ekonomi yang menjadi unggulan wilayah Kabupaten Pekalongan meliputi sektor primer adalah perikanan, sektor sekunder adalah tekstil, batik, dan pengolahan ikan serta sektor tersier adalah perdagangan dan jasa. Disisi lain, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata pada Provinsi Jawa tengah menjadi penyebab salah satu implikasi yang ditemukan berupa ketimpangan distribusi pembangunan antar wilayah, khususnya wilayah Kabupaten Pekalongan. Dengan adanya pengembangan ekonomi wilayah Kabupaten Pekalongan yang berbasis sumber daya alam diharapkan mampu mengembangkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Pekalongan. Pertimbangan lokasi juga menentukan kemajuan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sayangnya, Kabupaten Pekalongan tidak sepenuhnya dilalui jalan pantura (lintas pantai utara), sehingga kemajuan ekonomi Kabupaten Pekalongan tidak berkembang pesat seperti wilayah disekitarnya. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui lokasi yang berpotensi dalam meningkatkan aktivitas ekonomi sebagai langkah pemerataan pertumbuhan ekonomi kewilayahan Kabupaten Pekalongan.

1.2 Rumusan Masalah

Kabupaten Pekalongan merupakan bagian dari kawasan strategis yang memiliki sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulannya adalah pertanian, pariwisata, industri dan perikanan. Dalam Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029) Kabupaten Pekalongan memiliki fungsi sebagai salah satu wilayah pengembangan Pusat Pelayanan Lokal dan Provinsi. Dalam upaya pembangunan wilayah, masalah yang terpenting yang menjadi perhatian dalam penulisan laporan “Arahan Rencana Pengembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Kewilayahan Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah” menyangkut proses pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Dengan demikian, perlu dilakukan kajian terkait **“Jenis aktivitas ekonomi yang berpotensi yang dapat memajukan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan berupa apa saja dan Dimana lokasi sebaran dari pengembangan aktivitas ekonomi yang potensial“** untuk pemerataan pembangunan wilayah Kabupaten Pekalongan berdasarkan lokasi dan sector-sektor yang sesuai.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan penelitian dalam “Arahan Rencana Pengembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Kewilayahan Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah” didapatkan dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian. Tujuan berkaitan secara langsung dengan judul penelitian yang telah dirumuskan, sedangkan sasaran merupakan tahapan atau cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian

1.3.1 Tujuan

Tujuan dalam penyusunan laporan yang berjudul “Arahan Rencana Pengembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Kewilayahan Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah” ini sebagai berikut,

- Mengetahui potensi wilayah Kabupaten Pekalongan berdasarkan sumber daya alam
- Mengetahui jenis aktivitas ekonomi (investasi) berdasarkan sektor yang dikembangkan
- Mengetahui sebaran lokasi yang potensial untuk dikembangkan dalam pemerataan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan.

1.3.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan cara-cara sebagai langkah strategi. Cara-cara tersebut dijelaskan pada sasaran dibawah ini,

- Identifikasi wilayah studi baik secara kebijakan maupun kondisi fisik Kabupaten Pekalongan
- Merumuskan potensi pengembangan wilayah terhadap isu-isu permasalahan
- Menganalisa sebaran lokasi dan peluang investasi dalam pengembangan wilayah

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pembahasan laporan yang berjudul “Arahan Rencana Pengembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Kewilayahan Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah” terbagi menjadi dua bahasan yaitu ruang lingkup wilayah serta ruang lingkup materi yang dirincikan sebagai berikut,

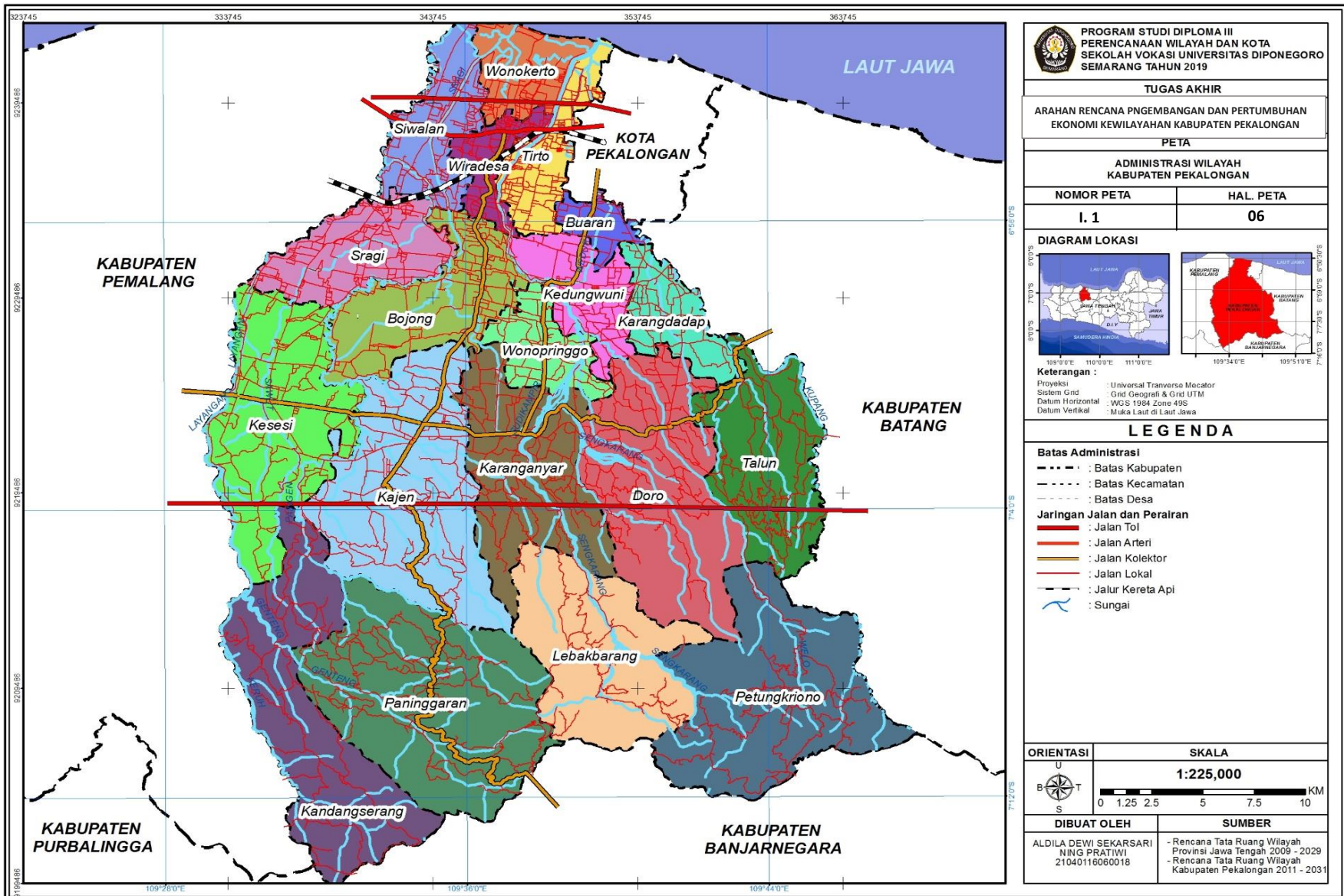
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Kabupaten Pekalongan menjadi salah satu bagian dari kawasan strategis Petanglong (Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulannya adalah pertanian, pariwisata, industri dan perikanan. Potensi ekonomi yang menjadi andalan wilayah tersebut meliputi sektor primer adalah perikanan, sektor sekunder adalah tekstil, batik, dan pengolahan ikan serta sektor tersier adalah jasa dan perdagangan. Dalam Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan memiliki fungsi sebagai salah satu wilayah pengembangan Pusat Pelayanan Lokal dan Provinsi. Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu daerah otonom di Propinsi Jawa Tengah, terletak di sepanjang pantai utara Laut Jawa, memanjang ke selatan berbatasan dengan wilayah Karesidenan Banyumas, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pemalang. Letaknya antara 6o - 7o23' Lintang Selatan dan antara 109o - 109o78' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Pekalongan adalah ± 836,15 Km². Terdiri atas 19 Kecamatan dan 285 desa/kelurahan. Dari 285 desa/ kelurahan yang ada, 11 desa merupakan desa pantai dan 274 desa bukan desa pantai. Menurut topografi desa, terdapat 66 desa/kelurahan (23,16 persen) yang berada di dataran tinggi dan selebihnya 219 desa/kelurahan (76,84 persen) berada di dataran rendah.

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Pembahasan dalam ruang lingkup materi ini terkait aspek-aspek dalam penentuan “Arahan Rencana Pengembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Kewilayahan Kabupaten

Pekalongan Provinsi Jawa Tengah”. Aspek- aspek tersebut terkait arahan rencana pengembangan dan pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Pekalongan yang berdasarkan pada kondisi eksisting maupun kebijakan terkait penataan ruang wilayah Kabupaten Pekalongan. Rencana pengembangan yang dilakukan nantinya didasarkan sector-sektor yang berpotensi dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan. Sektor-sektor potensial tersebut nantinya akan dikembangkan berdasarkan lokasi yang sesuai. Dalam penentuan sebaran lokasi dari kegiatan ekonomi baik dari segi kriteria lokasi dan jenis aktivitas memerlukan beberapa analisa terkait kesesuaian lahan, analisa jangkauan berdasarkan kondisi eksisting hingga analisa penentuan lokasi (untuk menentukan lokasi-lokasi yang memiliki potensi dan mendukung jenis aktivitas investasi). Dalam lingkup materi kajian ini, terdapat batasan materi dalam kriteria pertumbuhan ekonomi yaitu berdasarkan aksesibilitas Kabupaten Pekalongan. Aksesibilitas menjadi salah satu daya tarik dalam kegiatan pengembangan ekonomi, sayangnya kajian “Arahan Rencana Pengembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Kewilayahan Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah” mengkerucut terhadap factor potensial sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Pekalongan.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2031

Peta I. 1 Administrasi Wilayah Kabupaten Pekalongan

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang terdapat pada laporan ini terdiri dari lima bab, yaitu Pendahuluan, Kajian Literatur dan Metode Perencanaan, Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Pekalongan, Analisa dan Pembahasan, hingga Penutup. Berikut penjabaran mengenai sistematika penulisan dari laporan ini,

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penulisan hingga ruang lingkup yang terbagi lagi atas batasan ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi, serta proses pelaksanaan studi yang berisi tentang kerangka pengolahan data-data yang diperlukan dan sistematika penulisan laporan yang berjudul “Arahan Rencana Pengembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Kewilayahan Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah”

BAB II KAJIAN LITERATUR DAN METODE PERENCANAAN

Bab ini berisi tentang penjelasan umum ataupun dasar teori mengenai pengertian terkait perencanaan, pembangunan, kesesuaian lahan, penentuan lokasi hingga sector ekonomi unggulan dan teori investasi serta metode analisa yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan gambaran umum. Pada metode perencanaan berisikan gambaran jenis metode perencanaan (metode pengumpulan data, metode analisa data, teknik atau alat analisis) yang dilakukan dalam penyusunan penulisan laporan yang berjudul “Arahan Rencana Pengembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Kewilayahan Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah”

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN

Bab ini menjelaskan mengenai mengenai kebijakan-kebijakan yang berlaku saat ini dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan ini seta membahas karakteristik wilayah studi. Kebijakan yang dibahas diantaranya Kebijakan Perencanaan Tata Ruang yaitu RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi Jawa Tengah, RTRW Kabupaten Pekalongan; Kebijakan Perencanaan Pembangunan (RPJPD Wilayah Kabupaten Pekalongan, RPJMD Wilayah Kabupaten Pekalongan); dan Konstelasi Arah Kebijakan. Karakteristik wilayah studi perencanaan yang merupakan hasil dari survei lapangan yang telah dilakukan dan hasil dari pengolahan data-data sekunder terkait. Aspek yang dibahas meliputi kondisi fisik, tata guna lahan, kependudukan, sosial budaya, toponimi, perekonomian dan sarana prasarana yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan.

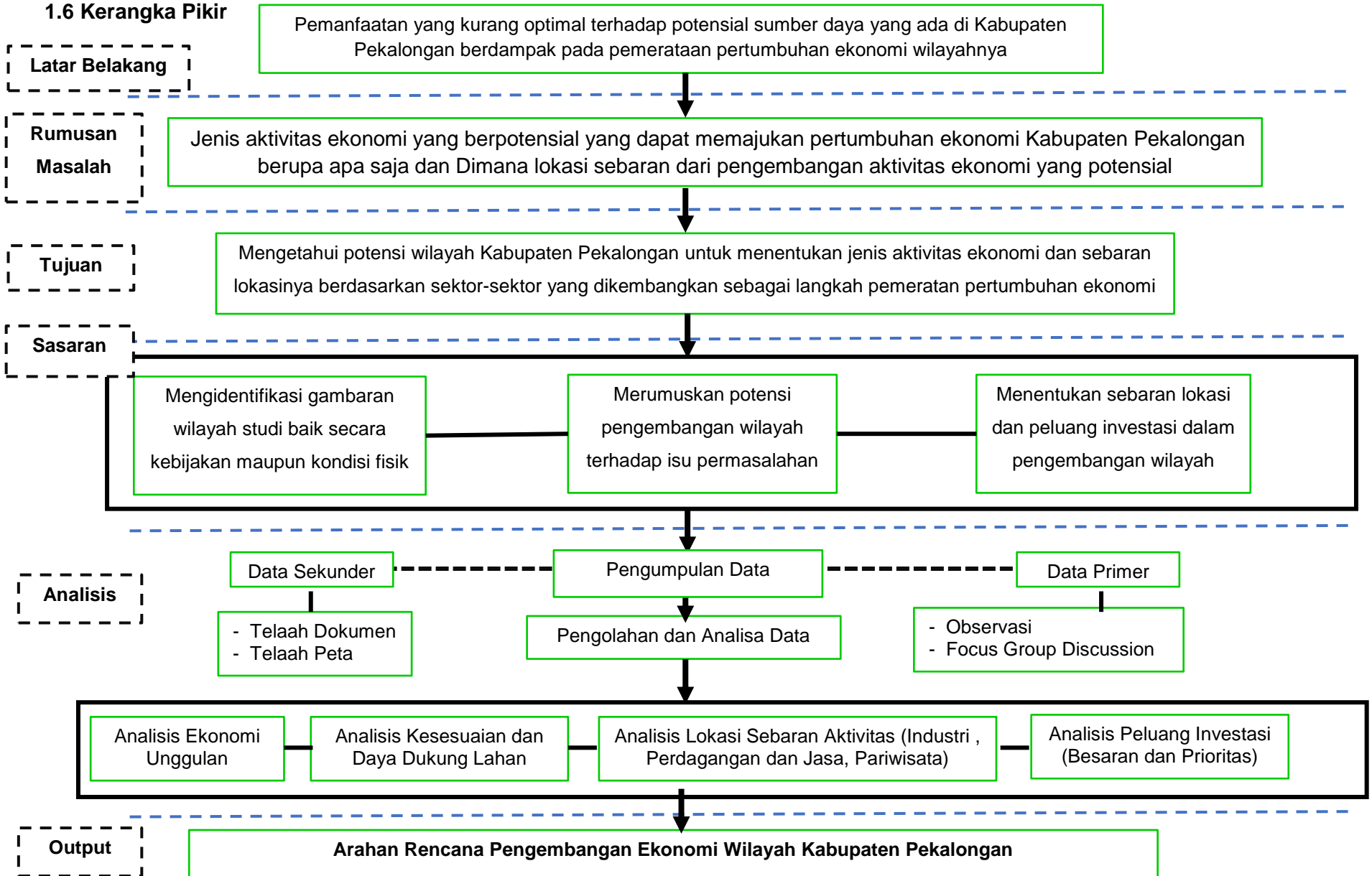
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang analisis dari data yang telah di dapatkan, baik melalui data-data sekunder maupun data primer yang diperoleh secara langsung melalui kegiatan survei yang telah dilakukan. Dalam bab ini analisis yang dilakukan adalah analisis penggunaan lahan, analisis demografi, analisis keruangan (zonasi kawasan), analisis kesesuaian lahan, serta analisis ekonomi sector unggulan maupun analisis investasi. Bab ini juga membahas tentang hasil dari pengolahan data dan analisis. Hasil yang dibahas nantinya hingga berupa peluang serta implikasi yang muncul terkait sebaran lokasi dan jenis aktivitas investasi yang sesuai dengan sektor-sektor ekonomi unggulan Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah,

BAB V PENUTUP

Pada bagian bab v yang sebagai penutup akan membahas tentang kesimpulan dari hasil penulisan laporan yang berjudul “Arahan Rencana Pengembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Kewilayahan Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah” dan rekomendasi terkait sebagai solusi penanganan peluang yang dihasilkan.

1.6 Kerangka Pikir



Gambar 1. 1 Bagan Kerangka Pikir